

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya muncul dari kekuatan yang belum difungsikan secara maksimal, menjadi kelemahan yang harus diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara dapat diuraikan berdasarkan data dan informasi setiap urusan penyelenggara pemerintahan daerah. Identifikasi permasalahan dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari SKPD.

4.1.1 Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah

1.URUSAN WAJIB

1.1 Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

Identifikasi Permasalahan pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pendidikan dan Kebudayaan,

- a. Belum meratanya akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat
 - b. Tingkat kompetensi pendidik masih rendah
 - c. Sarana dan prasarana peningkatan pendidikan belum memadai
 - d. Manajemen pengelolaan lembaga pendidikan belum terkelola dengan baik
-

- e. Rendahnya pemanfaatan sistem teknologi dan informasi
- f. Belum meratanya tenaga kependidikan di sebagian wilayah

Kebudayaan

- a. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian situs budaya dan seni budaya
- b. Pengembangan kelompok seni dan budaya masih kurang
- c. Fasilitas sarana dan prasarana guna pengembangan seni budaya daerah masih terbatas

Kesehatan

- a. Rendahnya status kesehatan Angka Kematian Ibu dan Bayi
- b. Masih tingginya angka penyakit menular (TB, HIV-AIDS, Malaria DB, dan Kasus Gigitan Anjing)
- c. Belum semua Puskesmas terakreditasi
- d. Terbatasnya tenaga kesehatan (kuantitas dan kualitas) dan distribusi yang tidak merata
- e. Masih kurangnya sarana prasarana kesehatan
- f. Belum semua masyarakat memiliki jaminan kesehatan
- g. Belum adanya sistim Informasi kesehatan
- h. Belum semua sarana kesehatan mempunyai pengelolaan limbah medis serta sarana kesehatan yang sudah mempunyai pengelolaan limbah medis belum berfungsi dengan baik.

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Kondisi jalan/jembatan masih rendah
 - b. Masih ada jaringan jalan belum terbangun pada daerah-daerah tertentu.
 - c. Minimnya prasarana air bersih dan sanitasi yang layak.
 - d. Masih kurangnya pembangunan drainase sekunder dan tersier
-

- e. Terbatasnya sarana dan prasarana irigasi yang tersedia serta menurunnya fungsi jaringan irigasi terbangun
- f. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pemeliharaan prasarana pengairan dan konservasi sumberdaya air
- g. Belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Daerah Milik Jalan (DAMIJA) Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA) Daerah Pengawasan Jalan
- h. Belum optimalnya peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam pemanfaatan ruang sesuai perundang-undangan yang berlaku
- i. Belum optimalnya peran TKPRD dalam mengendalikan pemanfaatan ruang
- j. Belum tersedianya data base infrastruktur ke-PU-an.

Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

- a. Belum tersedianya data base Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah
- b. Masih kurangnya kepemilikan lahan bersertifikat.
- c. Belum tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah
- d. Masih kurangnya rasio bangunan ber-IMB yang belum sesuai target.
- e. Luasan kawasan kumuh belum terpetakkan
- f. Data pembahasan lahan yang bersertifikat belum terupdate
- g. Belum tersedianya data base status kepemilikan lahan/tanah. Masih ada pemukiman kumuh di daerah perkotaan

Comment [WU1]: Tambahan dr. Devi
28042018

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Polisi Pamong Praja

- a. Masih lemahnya penegakan Perda
-

- b. Tingginya konflik kemasyarakatan yang ada di wilayah kecamatan
- c. Kurangnya SDM Linmas baik kualitas maupun kuantitas
- d. Masih terbatasnya sarana dan prasarana DAMKAR

Kesatuan Bangsa dan Politik

- a. Masih rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam menggunakan hak politik pada Pemilihan Umum
- b. Masih tingginya potensi terjadinya konflik politik pasca
- c. Minimnya kegiatan forum kerukunan antar umat beragama
- d. Potensi terjadinya konflik di wilayah perbatasan.

Sosial

- a. Masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
- b. Belum tersedianya Data base kemiskinan.

Penanggulangan Bencana

- a. Persentase kapasitas kesiagaan di daerah rawan bencana masih rendah
 - b. Responsitas dalam penanggulangan bencana belum sesuai waktu tanggap
 - c. Terbatasnya sarana prasarana dalam penanggulangan bencana
 - d. Belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi
 - e. Minimnya system informasi peringatan dini bencana
 - f. SDM penanggulangan bencana belum optimal
 - g. Persentase penyelesaian rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana belum optimal
-

1.2. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

Tenaga Kerja

- a. Angka pengangguran yang masih tinggi
- b. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana BLK
- d. Masih terbatasnya system informasi ketenagakerjaan

Transmigrasi

- a. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi Ketransmigrasian
- b. Ketersediaan lahan untuk pembangunan transmigrasi dibatasi oleh kawasan hutan
- c. Belum ditetapkannya Kota Terpadu Mandiri di Kawasan Transmigrasi

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

- a. Rasio Tingkat kasus KDRT yang masih tinggi
- b. Rendahnya Cakupan peserta KB aktif
- c. Masih rendahnya jumlah pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
- d. Tingginya kasus kenakalan anak/remaja yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan
- e. Rendahnya partisipasi perempuan di lembaga Legislatif dan Swasta.
- f. Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 belum memenuhi target

Ketahanan Pangan

- a. Skor PPH ketersediaan pangan belum beragam dan seimbang (PPH rendah)
-

- b. Belum tercapainya ketersediaan pangan utama dalam peningkatan ketahanan pangan
- c. Masih terbatasnya stok cadangan pangan daerah
- d. Sarana prasarana dalam penunjang keamanan pangan belum tersedia
- e. Masih terbatasnya lumbung pangan di sentra produksi swasembada pangan
- f. Informasi ketersediaan dan distribusi pangan masih rendah
- g. Harga pangan yang fluktuatif

Lingkungan Hidup

- a. Belum optimalnya penanganan sampah dan limbah B3
- b. Belum ada dokumen analisis dan kajian lingkungan
- c. belum terukurnya indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH
- d. Rendahnya pengawasan dokumen AMDAL
- e. kesadaran masyarakat tentang sampah masih kurang
- f. Tempat pembuangan akhir persatuan penduduk belum memenuhi target
- g. belum ada ketentuan tentang pengelolaan sampah dan limbah di daerah
- h. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan hutan
- i. Pemanfaatan sumber daya hutan yang tidak menerapkan prinsip-prinsip kelestarian
- j. Terbatasnya Pengawasan pengelolaan/pemanfaatan hasil hutan
- k. Tingginya polusi udara karen abu gunung

Comment [WU2]: Tambahan

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Belum optimalnya sosialisasi tentang administrasi kependudukan
-

- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat akta kelahiran
- c. Belum memadainya perangkat teknologi informasi dan sarana prasarana pendukung urusan kependudukan dan catatan sipil.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Masih rendahnya jumlah kelompok binaan LPM
- b. Belum adanya pengembangan kawasan perdesaan
- c. Sarana dan prasarana pendukung tugas Pemerintah Desa yang belum memadai
- d. Belum optimalnya peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam mendorong dan menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan isu lembaga ekonomi perdesaan yang berkembang
- e. masih terbatasnya pengetahuan Aparatur Pemerintahan Desa dalam pengelolaan manajemen desa
- f. minimnya pemahaman aparaturnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya meningkatnya kapasitas pelayanan PKK

Perhubungan

- a. Penyediaan sarana prasarana transportasi publik masih belum optimal
 - b. Prasarana dan pelayanan pelabuhan laut antar pulau masih kurang
 - c. Prasarana dan pelayanan pelabuhan udara antar kota masih kurang
 - d. Ketidak seimbangan antara penambahan jumlah prasarana jalan/volume jalan dengan pertumbuhan kendaraan
 - e. Belum adanya payung hukum peraturan pemerintah tentang lalu lintas dan angkutan jalan
-

- f. Minimnya kesadaran pengguna jasa transportasi akan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku
- g. Kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor

Comment [WU3]: Tambahan

Komunikasi, Informatika dan Persandian

- a. Belum optimalnya jumlah desa yang terkoneksi telepon dan internet
- b. Ketersediaan data di website pemda belum ter-update secara optimal
- c. Areal blank spot belum terjangkau secara merata
- d. Terbatasnya sarana prasarana BTS
- e. Belum ada regulasi bidang komunikasi, informatika dan persandian
- f. Terbatasnya sarana dan prasarana pos dan telematika
- g. Kurangnya SDM yang menguasai TIK guna mendukung pemanfaatan sistem informasi manajemen dan jaringan *e-government*

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Masih rendahnya akses permodalan
 - b. Belum Optimalnya kualitas, kuantitas , kontinuitas dan sarana prasarana produk koperasi dan Unit Usaha Mikro, dan UKM
 - c. Masih banyaknya UMKN yang bergerak di sektor informal (belum berbadan hukum)
 - d. Kurangnya tingkat partisipasi pelaku usaha
 - e. Kurang Optimalnya pelatihan ketrampilan terhadap produksi perkembangan pasar
 - f. Sistem Pemasaran dan sarana pasar masih kurang
 - g. Masih rendahnya Sistem Pemasaran dan Promosi
 - h. Belum adanya Regulasi di Bidang UKM
-

Penanaman Modal dan PTSP

- a. Masih rendahnya realisasi investasi PMDN dan PMA
- b. Belum optimalnya kinerja pelayanan perijinan usaha (pelayanan terpadu satu pintu)
- c. Sarana prasarana pelayanan perijinan masih kurang memadai
- d. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan
- e. Kinerja penanaman modal dalam rangka menciptakan peluang investasi dan promosi belum optimal (Jumlah investor skala nasional dan asing masih kurang)

Comment [WU4]: Tambahkan (hapus uraian di depan)

Kepemudaan dan Olahraga

- a. Belum optimalnya pembinaan secara kontinyu kepada para atlet serta belum memadainya sarana prasarana olahraga yang ada
 - b. Masih minimnya jumlah pembinaan aktif cabang-cabang olahraga yang akan diperlombakan
 - c. Pembinaan organisasi kepemudaan belum optimal
 - d. Masih minimnya sarana prasarana olahraga
 - e. Belum tersedianya gedung pusat pelatihan olahraga
 - f. Belum optimalnya pembinaan bagi kelompok pemuda yang berpotensi
 - g. Kurang tersedianya sarana pelatihan pemuda atau balai latihan kepemudaan
 - h. Belum optimalnya minat peserta penyandang cacat pada kegiatan lomba olahraga
 - i. Belum maksimalnya informasi yang diterima masyarakat terkait pameran prestasi hasil karya kepemudaan
 - j. Kurangnya klub-klub olahraga berprestasi
-

Kearsipan dan Perpustakaan

- a. Belum tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan umum daerah, perpustakaan desa dan perpustakaan sekolah yang memadai
- b. Kurangnya minat baca, sehingga pengunjung tidak sesuai dengan target
- c. Belum optimalnya SDM pengelola kearsipan pemerintah daerah, BUMD, sekolah dan perguruan tinggi
- d. Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan kearsipan SKPD, BUMD, sekolah/ perguruan tinggi, kecamatan/desa dan ORMAS
- e. Perlu adanya pembangunan depo arsip, sebagai syarat akreditasi dan pengawasan kearsipan pemda
- f. Belum tersedianya sistem kearsipan berbasis teknologi informasi

2. URUSAN PILIHAN

Kelautan Perikanan

- a. Masih rendahnya sistem alih teknologi dan diseminasi teknologi pengolahan produk perikanan.
 - b. Belum optimalnya usaha perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengolahan ikan.
 - c. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP);
 - d. Infrastruktur dan sarana prasarana untuk nelayan belum memadai.
 - e. Sinergitas program pemerintah daerah dengan program nasional belum optimal dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan
 - f. Minimnya tenaga penyuluh perikanan ramah lingkungan
 - g. Belum Optimalnya Ketersediaan Kualitas dan Kuantitas Bibit ikan dibidang perikanan
-

Pariwisata

- a. Pemanfaatan pengelolaan destinasi wisata belum optimal dilakukan.
- b. Pariwisata berbasis budaya lokal belum maksimal.
- c. Kondisi sarana dan prasarana pendukung destinasi wisata belum memadai
- d. Pelayanan dan sikap masyarakat di destinasi wisata belum menciptakan sapta pesona
- e. Kurangnya produk wisata yang atraktif, inovatif, dan edukatif
- f. Terbatasnya data dan system informasi pariwisata berbasis web
- g. Belum optimalnya promosi dan pemasaran pariwisata

Pertanian

- a. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRD masih rendah
 - b. Belum optimalnya Nilai Tukar Petani (NTP)
 - c. Tingkat kemampuan kelompok tani masih rendah
 - d. Kurangnya tenaga penyuluh pertanian dalam melaksanakan pendampingan
 - e. Belum meratanya pertumbuhan dunia usaha, lembaga-lembaga permodalan dan pemasaran pada sentra-sentra produksi.
 - f. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian
 - g. Belum optimalnya produksi dan produktivitas perkebunan
 - h. Intensitas serangan hama seksava pada tanaman kelapa masih tinggi
 - i. Masih terjadinya kasus penyebaran wabah penyakit ternak
 - j. Terbatasnya akses petani terhadap sumber permodalan
 - k. Kuantitas dan kualitas produk pertanian belum mendukung berkembangnya agro industry
-

Perdagangan dan Perindustrian

- a. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung di bidang Perindustrian dan Perdagangan,
- b. Belum adanya UPTD Metrologi maupun Balai Pengujian Mutu Barang yang menunjang pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa
- c. Belum ada perda yang memperkuat pengembangan di bidang Perindustrian dan Perdagangan
- d. Minimnya pola Kemitraan dalam menunjang kegiatan kewirusahaan
- e. Rendahnya kapasitas permodalan dalam mendukung kegiatan industri
- f. Belum optimalnya pemasaran produk hasil industri dan perdagangan
- g. Belum optimalnya investasi pengembangan sector Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)
- h. Belum optimalnya pelaksanaan prinsip *good mining practices* (pertambangan yang bersih dan benar)
- i. Masih Kurangnya Pengawasan dan Pengendalian harga pasar
- j. Distribusi Kebutuhan pokok belum merata

3. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Sekretariat Daerah

- a. Kesadaran untuk tertib administrasi keuangan masih rendah;
 - b. Belum tersedianya SDM penyusun Produk Hukum Daerah yakni Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - c. Koordinasi antara instansi terkait berjalan kurang baik dalam hal penyusunan Produk Hukum Daerah;
 - d. Belum tersedianya dokumen petunjuk teknis di bidang pelayanan Keagamaan terhadap masyarakat;
-

- e. Belum tersedianya dokumen petunjuk teknis di bidang pelayanan Perekonomian Rakyat;
- f. Belum sinkronnya program dan kegiatan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi maupun dengan kementerian/lembaga lainnya;
- g. Minimnya data pendukung sebagai akibat dari minimnya koordinasi antar pemerintah baik pemerintah provinsi maupun kementerian/lembaga terkait lainnya;
- h. Kurang optimalnya pelayanan yang diberikan oleh instansi terkait serta kurangnya aparatur yang kompeten sangat mempengaruhi usaha untuk mewujudkan pelayanan yang maksimal.
- i. Ektifitas dan efisiensi kerja dan pelayanan aparatur kepada publik belum optimal

Organisasi :

- a. Belum optimalnya penataan perangkat daerah;
- b. Nilai SAKIP masih rendah;
- c. Indeks Kepuasan Pelayanan Publik masih rendah;

Humas dan Protokoler:

- a. Belum optimalnya publikasi kegiatan Kepala Daerah;
- b. Sarana prasarana yang belum memadai;
- c. Kualitas SDM humas dan protokoluler masih kurang;

Perekonomian dan Kesra:

- a. Belum tersedianya dokumen petunjuk teknis di bidang pelayanan Perekonomian Rakyat;
 - b. Isu kegiatan keagamaan
-

ULP:

- a. ULP masih bersifat *add hoc*
- b. Masih minimnya kualitas dan kuantitas SDM;
- c. Masih minimnya partisipasi peserta dalam mengikuti lelang secara elektronik.

Administrasi dan Pengendalian Pembangunan:

- a. Belum optimalnya pengelolaan pengendalian pembangunan;

Tata Pemerintahan:

- a. Batas wilayah antar kabupaten;
- b. Pengembangan DOB;

Hukum dan HAM:

- a. Kualitas dan Kuantitas SDM penyusun Produk Hukum Daerah masih kurang;
- b. Koordinasi antara instansi terkait berjalan kurang baik dalam hal penyusunan Produk Hukum Daerah

Korpi:

- a. Belum optimalnya pembinaan PNS/ASN

Sekretariat DPRD

- a. Kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
 - b. Belum Lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP) secara teknis sehingga pengawasan internal masih kurang optimal
-

Inspektorat

- a. Minimnya kuantitas dan kualitas aparatur pengawasan keuangan serta minimnya sarana dan prasarana pengawasan keuangan dan inspektorat
- b. Pengawasan lebih diarahkan pada pengawasan represif (penanganan setelah terjadi penyimpangan) dari pengawasan preventif (pencegahan sebelum terjadi penyimpangan).
- c. Intensitas pengawasan memberikorelasi positif terhadap tingkat penyimpangan. Sejauh ini, jumlah unit kerja yang diawasi secara regular belum mencapai 25% dari setiap tahunnya
- d. Pengaduan masyarakat belum tertangani secara optimal.
- e. Evaluasi kinerja belum dapat dilaksanakan pada seluruh SKPD dan belum dilakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala
- f. Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP maupun BPK-RI sampai dengan tahun 2015 baru mencapai 72%.
- g. Hasil pengawasan yang kurang obyektif, transparan, dan akuntabel.
- h. Inspektorat belum maksimal menjalankan fungsi pendampingan/konsultansi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
- i. Minimnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan

Perencanaan Pembangunan

- a. Memantapkan peran BAPPEDA dalam fungsi koordinasi dengan berbagai pihak pemangku kepentingan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
 - b. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengendalian dan pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha
-

- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
- d. Dokumen perencanaan yang dihasilkan belum sinkron dan sinergis dengan dokumen perencanaan pada tingkatan Pemerintah Desa, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- e. Belum tersosialisasi secara maksimal dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara (RTRW)
- f. Belum optimalnya peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam pemanfaatan ruang sesuai perundang-undangan yang berlaku
- g. Belum optimalnya kualitas perencanaan, penataan dan pengelolaan ruang wilayah, agar menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidupkurangnya data dan informasi yang lengkap, akurat dan valid sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah
- h. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan

Keuangan dan Aset Daerah

- a. Persentase PAD mengalami penurunan
- b. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah
- c. Belum diterapkan perencanaan dan penganggaran terpadu
- d. Intensifikasi sumber-sumber PAD

Kepegawaian Daerah, dan Pengembangan SDA

- a. Sarana dan Prasarana yang belum memadai untuk mendukung pelayanan administrasi
-

- b. Terhambatnya penyampaian informasi Pegawai ASN secara cepat karena jangkauan lokasi SKPD/ Kecamatan terpencil yang menyebar didaerah
- c. Terbatasnya personil yang menangani kepegawaian dengan jumlah Pegawai ASN yang mendapatkan pelayanan
- d. Kualitas dan kuantitas ASN disetiap SKPD masih kurang
- e. Jumlah ASN tidak seimbang dengan beban kerja
- f. Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal masih terbatas
- g. Jumlah pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural masih terbatas.

Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik

- a. Belum optimalnya penyediaan SDM, sarana dan prasarana bagi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan statistik.
 - b. Belum optimalnya penelitian yang terarah dan aplikatif dibidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan inovasi dan teknologi
 - c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penelitian, pengembangan dan statistik sebagai sistem informasi daerah (SIDA)
 - d. Pengolaan data base yang kurang optimal, aktual, faktual dan terukur
 - e. Masih kurangnya pemetaan kajian yang sesuai dengan kebutuhan daerah
 - f. Masih minimnya publikasi hasil penelitian terkait dengan bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan inovasi dan teknologi
-

4.1.2.1 Menelaah Indikasi Program Pemanfaatan Ruang

Tabel.27
 Hasil Telaahan Struktur Ruang
 Kabupaten Halmahera Utara

| No | Rencana Struktur Ruang | Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Sesuai RTRW | | | | | |
|-----|---|---|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | |
| | | | | Lima Tahun ke-I | Lima Tahun ke-II | Lima Tahun ke-III | Lima Tahun ke-IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | 1. Pengembangan Pusat Pelayanan Hirarki 1 | | | | | | |
| I.1 | | Perencanaan Detail Kawasan Ibukota Kabupaten | Tobelo | √ | | | |
| I.2 | | Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan | Tobelo | √ | | | |
| I.3 | | Pembangunan Kawasan Jasa Perdagangan | Tobelo | √ | √ | | |
| I.4 | | Penataan Land Mark Kota | Tobelo | √ | | | |
| I.5 | | Pengembangan Kawasan Perkotaan | Tobelo | √ | √ | √ | √ |
| I.6 | | Pembangun Fasos dan Fasum | Tobelo | √ | √ | | |
| I.7 | | Penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan Kota | Tobelo | √ | | | |
| I.8 | | Konsolidasi Lahan | Tobelo | √ | √ | | |
| 2 | Pengembangan Pusat Pelayanan Hirarki 2 | | | | | | |
| 2.1 | | Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Kota | Galela, Kao, Malifut, Lolo da Utara | √ | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|---|---|---|--|--|
| 2.2 | | Penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan Kota | Galela, Kao, Malifut, Lolo da Utara | √ | | | |
| 2.3 | | Penataan Lingkungan Kawasan Kota | Galela, Kao, Malifut, Lolo da Utara | √ | √ | | |
| | | Peningkatan fungsi kawasan pemerintahan | Galela, Kao, Malifut, Lolo da Utara | √ | | | |
| 2.4 | | Pembangunan Fasos dan fasum | Galela, Kao, Malifut, Lolo da Utara | √ | | | |
| 2.5 | | Konsolidasi Lahan | Galela, Kao, Malifut, Lolo da Utara | √ | √ | | |
| 3 | Pengembangan Pusat Pelayanan Hirarki 3 | | | | | | |
| 3.1 | | a. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Pusat Kecamatan | Tobelo Tengah, Tobelo Utara, Tobelo Selatan, Tobelo Timur, Tobelo Barat, Galela Utara, Galela Selatan, Galela Barat, Kao, Utara, Kao Barat, Kao Teluk, Loloda Kepulauan | √ | | | |
| 3.2 | | Penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan Pst Kecamatan | Tobelo Tengah, Tobelo Utara, Tobelo Selatan, Tobelo Timur, Tobelo Barat, Galela Utara, Galela Selatan, Galela Barat, Kao, Utara, Kao Barat, Kao | √ | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|---|---|---|--|--|
| | | | Teluk, Loloda Kepulauan | | | | |
| 3.3 | | Penataan Lingkungan Kawasan Pst Kecamatan | Tobelo Tengah, Tob elo Utara, Tobelo Selatan, Tobelo Timur, Tobelo Barat, Galela Utara, Galela Selatan, Galela Barat, Kao, Utara, Kao Barat, Kao Teluk, Loloda Kepulauan | √ | √ | | |
| 3.4 | | Peningkatan fungsi kawasan pemerintahan | Tobelo Tengah, Tob elo Utara, Tobelo Selatan, Tobelo Timur, Tobelo Barat, Galela Utara, Galela Selatan, Galela Barat, Kao, Utara, Kao Barat, Kao Teluk, Loloda Kepulauan | √ | | | |
| 3.5 | | Pembangunan Fasos dan fasum | Tobelo Tengah, Tob elo Utara, Tobelo Selatan, Tobelo Timur, Tobelo Barat, Galela Utara, Galela Selatan, Galela | √ | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|--|---|---|---|---|---|
| | | | Barat, Kao, Utara, Kao Barat, Kao Teluk, Loloda Kepulauan | | | | |
| 4 | Pembangunan Kawasan Perdesaan | | | | | | |
| 4.1 | | Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Desa | Desa Pusat Pertumbuhan | √ | | | |
| 4.2 | | Peningkatan Fasilitas sosial dan Umum | Desa Pusat Pertumbuhan | √ | √ | | |
| 4.3 | | Penataan Lingkungan Kawasan Pusat Desa | Desa Pusat Pertumbuhan | √ | √ | | |
| 4.4 | Sistem Transportasi | Pengembangan Sistem Transportasi Darat | | | | √ | √ |
| 4.1 | | Pembangunan Jalan Halut Bypass | Kabupaten | | | √ | √ |
| 4.2 | | Pembangunan Jaringan Ring Road | Tobelo-Galela | | | √ | √ |
| 4.3 | | Peningkatan Jaringan Jalan | | | | √ | √ |
| 4.4 | | Peningkatan Jaringan Jalan Ruas wosia-Kalipitu | Tobelo | | | √ | √ |
| 4.5 | | Peningkatan Jaringan Jalan Ruas WKO-Popilo | Tobelo | | | √ | √ |
| 4.6 | | Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Tobelo | Tobelo | | | √ | √ |
| 4.7 | | Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Sp Tobe-Katana | Tobelo Selatan | | | √ | √ |
| 4.8 | | Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Togoliua-Gamsungi II | Tobelo Selatan | | | √ | √ |
| 4.9 | | Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Kota Kupa-Kupa | Tobelo Selatan | | | √ | √ |

| | | | | | | | |
|------|--|---|----------------|--|--|---|---|
| 4.10 | | Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Trans Halut-Talaga Paca | Tobelo Selatan | | | √ | √ |
| 4.11 | | Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Trans Gamsungi II-Gonga | Tobelo | | | √ | √ |
| 4.12 | | Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Trans Halut-Wawongira | Tobelo | | | √ | √ |
| 4.13 | | Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Soasio- | Galela | | | √ | √ |
| 4.14 | | Dokulamo-Lapter | Galela | | | √ | √ |
| 4.15 | | Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Seki-Halut-Wawongira | Galela | | | √ | √ |
| 4.16 | | Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Soasio-Dokulamo-Lapter | Galela | | | √ | √ |
| 4.17 | | Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Seki-Gotalamo | Galela | | | √ | √ |
| 4.18 | | Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Ngidiho-Lapi | Galela | | | √ | √ |
| 4.19 | | Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Lapi-Dorume | Galela | | | √ | √ |
| 4.20 | | Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Simau-Ake Ira | Galela | | | √ | √ |
| 4.21 | | Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Kota Soa-Siu | Kao | | | √ | √ |
| 4.22 | | Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Kao-Toliwang | Kao | | | √ | √ |

| | | | | | | | |
|------|--|---|-----|--|--|---|---|
| 4.23 | | Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Toliwang-Kusuri | Kao | | | √ | √ |
| 4.24 | | Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Sp Biang-Popon | Kao | | | √ | √ |
| 4.25 | | Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Kao-Dimdim | Kao | | | √ | √ |

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Halmahera Utara, Tahun 2016

4.1.2 Penelaahan RPJPD Kabupaten Halmahera Utara

Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun berkenaan. Suatu program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai platform Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Tabel 4.1
Identifikasi Permasalahan dan Kebijakan dalam RPJPD Kabupaten Halmahera Utara

| No | Sasaran Pokok RPJPD Tahap ke 3 (2016-2020) | Indikator dan Target RPJPD | Permasalahan Pembangunan Daerah | Faktor-faktor Penentu Keberhasilan |
|----|--|---|---|------------------------------------|
| | Peningkatan dan penataan infrastruktur daerah : | Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk membuka aksesibilitas | Permasalahan pelayanan publik dan infrastruktur Daerah. | Ketersediaan |

| No | Sasaran Pokok RPJPD Tahap ke 3 (2016-2020) | Indikator dan Target RPJPD | Permasalahan Pembangunan Daerah | Faktor-faktor Penentu Keberhasilan |
|----|---|--|--|------------------------------------|
| | | <p>perhubungan serta mengurangi tingkat keterisolasian dan kesenjangan antar wilayah.</p> <p>kebijakan Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi.</p> <p>Pengembangan sumber daya air.</p> <p>Perumahan dan permukiman;</p> | | |
| | <p>Peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis teknologi dan informasi :</p> | <p>Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang lebih berkualitas.</p> <p>Pembangunan perdesaan/</p> <p>Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.</p> <p>Perbaikan iklim ketenagakerjaan.</p> | <p>Permasalahan pemerintahan dan aparatur</p> <p>Permasalahan pendidikan dan kesehatan</p> <p>Permasalahan pengembangan ekonomi unggulan daerah</p> <p>Permasalahan kepemudaan, olah raga dan pemberdayaan kaum perempuan.</p> | |
| | <p>Pengembangan ekonomi dengan pemberdayaan ekonomi lokal yang kompetitif;</p> | <p>Terbangunnya ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan secara berkelanjutan.</p> <p>Revitalisasi kehutanan.</p> <p>Revitalisasi pertanian.</p> <p>4. Bantuan benih/bibit tanaman</p> | | |

| No | Sasaran Pokok RPJPD Tahap ke 3 (2016-2020) | Indikator dan Target RPJPD | Permasalahan Pembangunan Daerah | Faktor-faktor Penentu Keberhasilan |
|----|---|--|---|------------------------------------|
| | | pangan dan bibit ternak kepada petani di perdesaan | | |
| | Pengelolaan sumber daya alam yang berbasis lingkungan | | | |
| | Peningkatan pembangunan bidang sosial budaya, politik dan keamanan | | Permasalahan Politik dan Demokrasi Permasalahan pelestarian budaya local Permasalahan pembangunan keagamaan Permasalahan penegakan hukum dan HAM | |

Sumber: RPJPD Kabupaten Halmahera Utara, Tahun 2016

4.2 Identifikasi Permasalahan untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan atau terkait dengan sasaran pokok (RPJPD) dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah (RPJMD) dalam suatu periode. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan dimaksud tidak diselenggarakan Pemerintah Daerah. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa-masa lalu atau memenuhi standar layanan bagi masyarakat.

Maksud dari analisis permasalahan pembangunan diseluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan adalah guna menjamin diperolehnya identifikasi permasalahan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan, diluar permasalahan program pembangunan daerah.

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya dorong yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

4.3. Penelaahan RPJMN dan RPJMD Provinsi

Penelaahan kebijakan Pembangunan nasional yang ditetapkan dengan mengadopsi atau selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.

Tabel 4.2

Identifikasi Permasalahan dan Kebijakan dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Maluku Utara Yang berkaitan dengan Kabupaten Halmahera Utara

| Kebijakan Nasional | |
|---|--|
| RPJMN | RPJMD Provinsi |
| <p>Misi Pembangunan</p> <p>1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian indonesia sebagai negara kepulauan</p> <p>Mewujudkan masyarakat maju,berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum</p> <p>Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim</p> <p>Mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia yang tinggi,maju dan</p> | <p>Misi Pembangunan</p> <p>Membangun masyarakat Maluku Utara yang memiliki kualitas hidup baik untuk dapat bekerja secara mandiri (Misi Cerdas)</p> <p>Mendorong pertumbuhan, stabilitas dan pendistribusian pembangunan ekonomi secara adil dan merata serta peningkatan nilai tambah produksi melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan</p> <p>(Misi Indah)</p> <p>Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk menunjang pengembangan ekonomi wilayah (Misi Nikmat)</p> <p>Membangun kehidupan beragama dan berbudaya yang menjadi inspirasi bagi kebangkitan seluruh sektor kehidupan masyarakat Maluku Utara (Misi Taqwa)</p> <p>Memperbaiki tata kelola pemerintahan</p> |

| Kebijakan Nasional | |
|--|--|
| RPJMN | RPJMD Provinsi |
| <p>sejahtera.</p> <p>Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.</p> <p>Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional</p> <p>Mewujudkan masyarakat yang berkepentingan dalam kebudayaan.</p> <p>Sembilan Agenda Prioritas/ NAWA CITA</p> <p>Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.</p> <p>Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis dan terpercaya.</p> <p>Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.</p> <p>Memperkuat kehadiran negara dalam reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.</p> <p>Meningkatkan kualitas hidup.</p> <p>Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.</p> <p>Mewujudkan kemandirian ekonomi</p> | <p>Maluku Utara untuk mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan berwibawa (Misi Aman)</p> <p>Agenda Pembangunan Strategis/ Gebrakan Cinta Gosale Puncak</p> <p>Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan)</p> <p>Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan</p> <p>Percepatan pembangunan infrastruktur membangun kehidupan yang beragama dan berbudaya</p> <p>reformasi birokrasi</p> <p>Kebijakan di dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019 kaitannya dgn Halmahera utara</p> <p>Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan yang mendukung pelayanan kesehatan di kabupaten/kota.</p> <p>Terwujudnya sinergitas dan koordinasi dalam</p> <p>Pelaksanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota;</p> <p>Terlaksananya pengembangan Jaringan jalan yang menjangkau Kawasan Strategis Provinsi (KSP)</p> |

| Kebijakan Nasional | |
|---|----------------|
| RPJMN | RPJMD Provinsi |
| <p>dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.</p> <p>Melakukan revolusi karakter mental</p> <p>Memperteguh Kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.</p> <p>Kebijakan di dalam RPJMN 2014-2019 kaitannya dengan maluku utara dan Halmahera Utara</p> <p>Pengembangan Kawasan Strategis</p> <p>Percepatan Penguatan Konektivitas</p> <p>Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan</p> <p>Kebijakan untuk mewujudkan sistem jaringan prasarana yang handal berbasis gugus pulau serta kawasan permukiman perkotaan yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.</p> <p>Kegiatan strategis infrastruktur jangka menengah nasional di Prov. Maluku Utara</p> | |

Sumber: RPJMN dan RPJMD, diolah Bappeda, Tahun 2016

4.3.1 Penelaahan RPJPD Kabupaten Halmahera Utara dengan RPJMD Kabupaten Halmahera Utara

RPJMD Tahun 2016–2021 merupakan RPJMD Tahap ketiga dari tahapan pelaksanaan RPJPD Tahun 2005–2025. Oleh karena itu RPJMD 2016-2021 selain menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati periode 2016–2021, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Tahun 2005–2025 dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Keterkaitan RPJPD Tahun 2005-2025
dengan RPJMD Tahun 2016 -2021

| RPJPD | | RPJMD | |
|-----------|---|--|---|
| Tujuan 1 | Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih | Tujuan 1.1 Tujuan 1.2 | Mewujudkan Pemerintahan yang baik Mewujudkan Pemerintahan yang bersih |
| Tujuan 2 | Meningkatkan kualitas pelayanan Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur | Tujuan 2.1 Tujuan 2.2 Tujuan 2.3 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan Meningkatkan Kalitas Pelayanan Bidang Instruktur dasar |
| Tujuan 3 | Meningkatkan persamaan hak dan kedudukan bagi seluruh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan | Tujuan 3.1 | Mewujudkan persamaan hak dan kedudukan bagi seluruh warga masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan antara seluruh masyarakat |
| Tujuan 4 | Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi kekayaan alam yang berwawasan lingkungan dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan serta mengurangi angka kemiskinan | Tujuan 4.1 | Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi kekayaan alam yang berwawasan lingkungan dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan serta mengurangi angka kemiskinan |
| Sasaran 1 | Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih | Sasaran 1.1.1 Sasaran 1.1.2 Sasaran 1.1.3 Sasaran 1.1.4 Sasaran 1.1.5 Sasaran 1.2.1 Sasaran 1.2.2 Sasaran | Terlaksananya Reformasi Birokrasi Terwujudnya pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan minimal Terlaksananya demokrasi dan supremasi hukum Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis web Terwujudnya pengelolaan penanggulangan bencana Terselenggaranya pelaksanaan pengelolaan keuangan yang akuntabel Terwujudnya aparatur pemerintah yang disiplin dan berprestasi serta bebas KKN. Terselenggaranya evaluasi produk hukum daerah dan penyebaran peraturan perundang-undangan |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | 1.2.3 Sasaran 1.2.4 Sasaran 1.2.5 | daerah Terwujudnya pelayanan terpadu yang efisien dan efektif dan meningkatkan sumber-sumber penerimaan PAD Terwujudnya koordinasi aparat hukum dan jajarannya |
| Sasaran 2 | Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan | Sasaran 2.1.1 Sasaran 2.1.2 Sasaran 2.1.3 | Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat Terwujudnya Jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat (<i>Universal Coverage</i>) Terwujudnya SDM Kesehatan sesuai kompetensi |
| Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang n Sasaran 3 | Meningkatkan kualitas pelayanan bidang pendidikan | Sasaran 2.2.1 Sasaran 2.2.2 Sasaran 2.2.3 | Terwujudnya pemerataan dan jangkauan akses pelayanan pendidikan Terwujudnya mutu dan kualitas pendidikan Terwujudnya prosentase dan koleksi bahan pustakaserta meningkatkan minat baca |
| Sasaran 4 | Meningkatkan kualitas bidang infrastruktur dasar | Sasaran 2.3.1 Sasaran 2.3.2 Sasaran 2.3.3 Sasaran 2.3.4 Sasaran 2.3.5 Sasaran 2.3.6 Sasaran 2.3.7 | Terwujudnya prosentase kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Kesehatan Terwujudnya prosentase kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan Terwujudnya Peningkatan aksesibilitas transportasi darat, laut dan udara Terwujudnya ketersediaan sumber energi Terwujudnya fasilitas air minum dan sanitasi yang layak Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pedesaan dan Perkotaa Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang |
| Sasaran 5 | Mewujudkan persamaan hak dan kedudukan bagi seluruh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan | Sasaran 3.1.1 Sasaran 3.1.2 | Terwujudnya persamaan hak antar berbagai etnis di Kabupaten Halmahera Utara Terwujudnya Kesetaraan Gender Terwujudnya kerukunan |

Comment [Office5]:

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| | | Sasaran 3.1.3 | antar dan inter umat beragama |
| Sasaran 6 | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi kekayaan alam yang berwawasan lingkungan | Sasaran 4.1.1 Sasaran 4.1.2 Sasaran 4.1.3 | Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan potensi pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, peternakan, pariwisata dan kehutanan Terwujudnya Swasembada dan Ketahanan pangan Terwujudnya Lingkungan Hidup yang berkualitas dan berkelanjutan |
| Sasaran 7 | Menumbuhkan jiwa kewirausahaan | Sasaran 4.2.1 Sasaran 4.2.2 Sasaran 4.2.3 Sasaran 4.2.4 Sasaran 4.2.5 | Terwujudnya database perekonomian termasuk database usaha menengah dan kecil serta ketenagakerjaan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan yang berbasis pengembangan keterampilan individu dan kelompok Peningkatan kolaborasi antara pemerintah dan swasta (<i>Public Private Partnership</i>) Terlaksananya aksesibilitas permodalan, pemasaran dan teknologi serta promosi produk UMKM Terlaksananya fungsi kelembagaan Koperasi |
| Sasaran 8 | Mengurangi angka kemiskinan | Sasaran 4.3.1 Sasaran 4.3.2 | Terwujudnya Ketersediaan Lapangan kerja Terwujudnya Pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin, Lansia dan yang berkebutuhan khusus |

Sumber : RPJPD 2005 – 2025 dan RJMD 2016 – 2021 Kab. Halmahera Utara diolah Bappeda 2016

4.3.2 Penelaahan RPJMD Propinsi dengan RPJMD Kabupaten

Halmahera Utara 2016-2021

Keterkaitan RPJMD Propinsi dengan RPJMD Kabupaten Halmahera Utara dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4
Keterkaitan RPJMD Provinsi dengan RPJMD Kabupaten Halmahera
Utara Tahun 2016-2021

| RPJMD PROVINSI | | RPJMD KABUPATEN | |
|----------------|---|-----------------|---|
| TUJUAN | | | |
| Tujuan 5.2 | Mewujudkan pelayanan publik yang prima | Tujuan 1.1 | Mewujudkan Pemerintahan yang baik |
| Tujuan 5.3 | Meningkatkan sinergitas dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. | | |
| Tujuan 5.1 | Menciptakan organisasi yang menjalankan fungsi pelayanan, profesional, berdaya guna, produktif, aspiratif, partisipatif, terpadu, transparan, dan bebas dari KKN. | Tujuan 1.2 | Mewujudkan Pemerintahan yang bersih |
| Tujuan 5.4 | Meningkatkan kapasitas, akuntabilitas dan kinerja birokrasi. | | |
| Tujuan 1.2 | Mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan | Tujuan 2.1 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan |
| Tujuan 1.1 | Meningkatkan kualitas SDM, Sarana dan prasarana pendidikan | Tujuan 2.2 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan |
| Tujuan 3.1 | Meningkatkan pelayanan sistem jaringan jalan | Tujuan 2.3 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Infrastruktur Dasar |
| Tujuan 3.2 | Meningkatkan konservasi dan pemanfaatan sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air | | |
| Tujuan 3.3 | Meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi | | |
| Tujuan 3.4 | Meningkatkan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan | | |
| Tujuan 3.5 | Melaksanakan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman | | |
| Tujuan 3.6 | Meningkatkan layanan listrik dan telekomunikasi | | |
| Tujuan 3.3 | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang | | |
| Tujuan 4.1 | Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat yang religius serta meningkatkan kepedulian sosial | Tujuan 3.1 | Mewujudkan Persamaan Hak dan Kedudukan Bagi Seluruh Warga Masyarakat dalam Berbagai Aspek Kehidupan Antara Seluruh Masyarakat |
| Tujuan 4.2 | Mengembangkan seni dan budaya | | |
| Tujuan 2.3 | Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan | Tujuan 4.1 | Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Kekayaan Alam yang Berwawasan Lingkungan |
| Tujuan 2.1 | Memperluas kegiatan usaha barang dan jasa secara efisien serta mewujudkan swasembada pangan dan industri yang berbasis SDA. | | |
| | | Tujuan | Menumbuhkan Jiwa |

| | | | |
|----------------|--|---------------|--|
| | | 4.2 | Kewirausahaan |
| Tujuan 2.2 | Meningkatkan penghasilan masyarakat dan lapangan kerja. | Tujuan 4.3 | Mengurangi Angka Kemiskinan |
| SASARAN | | | |
| Sasaran 5.2.1 | Meningkatnya aparaturnya yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera. | Sasaran 1.1.1 | Terlaksananya reformasi birokrasi |
| Sasaran 5.2.2 | Meningkatnya pelayanan prima yang berorientasi pada masyarakat dan dunia usaha; | | |
| Sasaran 5.2.3 | Terwujudnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>rightsizing</i>); | | |
| Sasaran 5.2.4 | Meningkatnya sistem prosedur dan tata kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i> ; | | |
| Sasaran 5.2.5 | Terwujudnya sinergitas dan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. | | |
| | | Sasaran 1.1.2 | Terwujudnya pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan minimal |
| | | Sasaran 1.1.3 | Terlaksananya demokrasi dan supremasi hukum |
| Sasaran 5.1.2 | Tersedianya <i>e-Database</i> pada SKPD yang berbasis geospasial | Sasaran 1.1.4 | Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis website |
| | | Sasaran 1.1.5 | Terwujudnya Pengelolaan Penanggulangan Bencana |
| Sasaran 5.2.6 | Meningkatnya kapasitas, kuantabilitas dan kinerja birokrasi. | Sasaran 1.2.1 | Terselenggaranya pelaksanaan pengelolaan keuangan yang akuntabel |
| | | Sasaran 1.2.2 | Terwujudnya aparaturnya pemerintah yang disiplin dan berprestasi serta bebas KKN. |
| | | Sasaran 1.2.3 | Terselenggaranya evaluasi produk hukum daerah dan penyebaran peraturan perundang-undangan daerah |
| | | Sasaran 1.2.4 | Terwujudnya pelayanan terpadu yang efisien dan efektif dan meningkatkan sumber-sumber penerimaan |

| | | | |
|---------------|--|---------------|---|
| | | | PAD |
| | | Sasaran 1.2.5 | Terwujudnya koordinasi aparat hukum dan jajarannya |
| Sasaran 1.2.1 | Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, mandiri dan berkeadilan | Sasaran 2.1.1 | Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat |
| Sasaran 1.2.2 | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan yang mendukung pelayanan kesehatan di kabupaten/kota. | Sasaran 2.1.2 | Terwujudnya Jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat (<i>Universal Coverage</i>) |
| | | Sasaran 2.1.3 | Terwujudnya SDM Kesehatan sesuai kompetensi |
| | | Sasaran 2.2.1 | Terwujudnya pemerataan dan jangkauan akses pelayanan Pendidikan |
| Sasaran 1.1.1 | Meningkatnya kualitas SDM | Sasaran 2.2.2 | pendidikan Terwujudnya mutu dan kualitas pendidikan |
| | | Sasaran 2.2.3 | Terwujudnya prosentase dan koleksi bahan pustakaserta meningkatkan minat baca |
| | | Sasaran 2.3.1 | Terwujudnya prosentase kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Kesehatan |
| Sasaran 1.1.2 | Bertambahnya sarana dan prasarana disemua jenjang dan jenis pendidikan | Sasaran 2.3.2 | Terwujudnya prosentase kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan |
| Sasaran 3.1.1 | Terlaksananya pengembangan jaringan jalan yang menjangkau Kawasan Strategis Provinsi (KSP) | Sasaran 2.3.3 | Terwujudnya Peningkatan aksesibilitas transportasi darat, laut dan udara |
| Sasaran 3.2.1 | Mewujudkan sistem transportasi wilayah | | |
| Sasaran 3.6.1 | Meningkatnya jangkauan layanan Listrik; | Sasaran 2.3.4 | Terwujudnya ketersediaan sumber energi |
| Sasaran 3.3.1 | Meningkatnya pelayanan air minum dan akses terhadap sanitasi layak | Sasaran 2.3.5 | Terwujudnya fasilitas air minum dan sanitasi yang layak |
| Sasaran 3.2.1 | Terlaksananya pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana SDA | Sasaran 2.3.6 | Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pedesaan dan Perkotaa |
| Sasaran 3.2.2 | Terlindunginya wilayah permukiman dari daya rusak air | | |
| Sasaran 3.5.1 | Meningkatnya Kualitas Perumahan dan permukiman | | |

Comment [Office6]:

| | | | |
|---------------|---|---------------|--|
| Sasaran 3.6.2 | Meningkatnya layanan telekomunikasi; | | |
| Sasaran 3.7.1 | Optimalisasi fungsi perencanaan dan pengendalian penataan ruang; | Sasaran 2.3.7 | Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang |
| Sasaran 4.1.2 | Meningkatnya kehidupan dan kepedulian sosial; | Sasaran 3.1.1 | Terwujudnya persamaan hak antar berbagai etnis di Kabupaten Halmahera Utara |
| | | Sasaran 3.1.2 | Terwujudnya Kesetaraan Gender |
| Sasaran 4.1.3 | Terwujudnya kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadah dan meningkatkan peran serta fungsi lembaga keagamaan; | Sasaran 3.1.3 | Terwujudnya kerukunan antar dan inter umat beragama |
| Sasaran 4.1.1 | Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang religius; | | |
| Sasaran 4.2.1 | Terwujudnya seni dan budaya yang religius, tangguh, disiplin, kuat, inovatif dan kreatif. | | |
| Sasaran 4.2.1 | Tercapainya usaha pertanian yang mampu mewujudkan swasembada pangan; | Sasaran 4.1.1 | Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan potensi pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, peternakan, pariwisata dan kehutanan |
| | | Sasaran 4.1.2 | Terwujudnya Swasembada dan Ketahanan pangan |
| Sasaran 4.2.1 | Terwujudnya lingkungan hidup yang berkesinambungan dan berkualitas. | Sasaran 4.1.3 | Terwujudnya Lingkungan Hidup yang berkualitas dan berkelanjutan |
| | | Sasaran 4.2.1 | Terwujudnya database perekonomian termasuk database usaha menengah dan kecil serta ketenagakerjaan |
| | | Sasaran 4.2.2 | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan yang berbasis pengembangan keterampilan individu dan kelompok |
| Sasaran 4.2.1 | Terlaksananya kegiatan usaha barang dan jasa secara efisien serta | Sasaran 4.2.3 | Peningkatan kolaborasi antara pemerintah dan |

| | | | |
|---------------|--|---------------|--|
| | terwujudnya industri yang berbasis sumber daya alam; | | swasta (<i>Public Private Partnership</i>) |
| Sasaran 4.2.1 | Terwujudnya kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses sumber pendanaan dan pasar. | Sasaran 4.2.4 | Terlaksananya aksesibilitas permodalan, pemasaran dan teknologi serta promosi produk UMKM |
| | | Sasaran 4.2.5 | Terlaksananya fungsi kelembagaan Koperasi |
| Sasaran 4.2.1 | Meningkatnya lapangan kerja yang berpihak pada tenaga kerja lokal dan membaiknya pendapatan perkapita. | Sasaran 4.3.1 | Terwujudnya Ketersediaan Lapangan kerja |
| | | Sasaran 4.3.2 | Terwujudnya Pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin, Lansia dan yang berkebutuhan khusus |

Sumber : RPJMD Propinsi 2014-2019 dan RPJMD Kabupaten Halmahera Utara 2016-2021, diolah Bappeda 2016

4.3.3 Penelaahan RPJMN dan RPJMD Kabupaten Halmahera Utara

Keterkaitan tujuan dan sasaran arah pembangunan RPJMN Tahun 2015-2019 dengan RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5
Keterkaitan RPJMN Tahun 2015-2019 dengan
RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021

| RPJM NASIONAL | | RPJMD KABUPATEN | |
|---------------|---|-----------------|--|
| Nawa Cita 2. | Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. | Tujuan 1.1 | Mewujudkan Pemerintahan yang baik. |
| | | Tujuan 1.2 | Mewujudkan Pemerintahan yang bersih |
| Nawa Cita 5. | Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. | Tujuan 2.1 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan. |
| | | Tujuan 2.2 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan. |
| Nawa Cita 3. | Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. | Tujuan 2.3 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Instruktur dasar. |
| Nawa Cita 4. | Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan | Tujuan 3.1 | Mewujudkan persamaan hak dan kedudukan bagi seluruh warga masyarakat |

| | | | |
|----------------|---|---------------|--|
| | penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. | | dalam berbagai aspek kehidupan antara seluruh masyarakat |
| Nawa Cita 7. | Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. | Tujuan 4.1 | Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi kekayaan alam yang berwawasan lingkungan |
| Nawa Cita 8. | Melakukan revolusi karakter bangsa. | Tujuan 4.2 | Menumbuhkan jiwa kewirausahaan. |
| Nawa Cita 1. | Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. | Tujuan 4.3 | Mengurangi angka kemiskinan. |
| Sasaran 6.2.4. | Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional (RBN) | Sasaran 1.1.1 | Terlaksananya Reformasi Birokrasi |
| Sasaran 6.2.5. | Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. | Sasaran 1.1.2 | Terwujudnya pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan minimal |
| Sasaran 6.2.1. | Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik melalui reformasi sistem kepartaian dan sistem pemilu, penguatan sistem presidensial dan penguatan lembaga perwakilan. | Sasaran 1.1.3 | Terlaksananya demokrasi dan supremasi hukum |
| Sasaran 6.6.7. | Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi. | Sasaran 1.1.4 | Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis web. |
| Sasaran 6.7.3. | Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; 3.Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana | Sasaran 1.1.5 | Terwujudnya pengelolaan penanggulangan bencana. |
| Sasaran 6.2.3. | Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan | Sasaran 1.2.1 | Terselenggaranya pelaksanaan pengelolaan keuangan yang akuntabel |
| Sasaran | Pencegahan dan | Sasaran | Terwujudnya aparatur |

| | | | |
|----------------|--|---------------|---|
| 6.4.2. | Pemberantasan Korupsi | 1.2.2 | pemerintah yang disiplin dan berprestasi serta bebas KKN. |
| Sasaran 6.4.1 | Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan | Sasaran 1.2.3 | Terselenggaranya evaluasi produk hukum daerah dan penyebaran peraturan perundang-undangan daerah |
| Sasaran 6.7.6. | Penguatan Kapasitas Fiskal Negara | Sasaran 1.2.4 | Terwujudnya pelayanan terpadu yang efisien dan efektif dan meningkatkan sumber-sumber penerimaan PAD. |
| Sasaran 6.4.1. | Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan. | Sasaran 1.2.5 | Terwujudnya koordinasi aparat hukum dan jajarannya |
| Sasaran 6.5. | Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia ; 3. Pembangunan Kesehatan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Sehat, - Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan, | Sasaran 2.1.1 | Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat |
| Sasaran 6.5. | Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia ; 3. Pembangunan Kesehatan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Sehat, - terwujudnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan | Sasaran 2.1.2 | Terwujudnya Jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat (<i>Universal Coverage</i>) |
| Sasaran 6.5. | Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia ; 3. Pembangunan Kesehatan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Sehat, - terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin, serta meningkatkan responsivitas sistem | Sasaran 2.1.3 | Terwujudnya SDM Kesehatan sesuai kompetensi |

Comment [Office7]:

| | | | |
|----------------|--|---------------|---|
| | kesehatan | | |
| Sasaran 6.5. | Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia ; 1) Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah | Sasaran 2.2.1 | Terwujudnya pemerataan dan jangkauan akses pelayanan pendidikan . |
| Sasaran 6.5. | Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia ; 5) Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian pendidikan yang komprehensif. | Sasaran 2.2.2 | Terwujudnya mutu dan kualitas pendidikan |
| Sasaran 6.8. | Melakukan Revolusi Karakter Bangsa | Sasaran 2.2.3 | Terwujudnya prosentase dan koleksi bahan pustakaserta <u>meningkatkan minat baca.</u> |
| Sasaran 6.5. | Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia ; 3. Pembangunan Kesehatan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Sehat. - meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan. | Sasaran 2.3.1 | Terwujudnya prosentase kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Kesehatan |
| Sasaran 6.5. | Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia ; 5) Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian pendidikan yang komprehensif. | Sasaran 2.3.2 | Terwujudnya prosentase kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan |
| Sasaran 6.6.1. | Membangun Konektivitas Nasional Untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan; 1) Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antar moda. | Sasaran 2.3.3 | Terwujudnya Peningkatan aksesibilitas transportasi darat, laut dan udara. |
| Sasaran | Kedaulatan Energi | Sasaran | Terwujudnya ketersediaan |

| | | | |
|----------------|---|---------------|---|
| 6.7.2. | | 2.3.4 | sumber energi |
| Sasaran 6.6.3. | Membangun Infrastruktur/ Prasarana Dasar ; - Pembangunan Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi. | Sasaran 2.3.5 | Terwujudnya fasilitas air minum dan sanitasi yang layak. |
| Sasaran 6.3.2. | Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Kawasan Timur Indonesia. | Sasaran 2.3.6 | Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pedesaan dan Perkotaan. |
| Sasaran 6.3.2. | Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Kawasan Timur Indonesia. 1.Pengembangan Kawasan Strategis | Sasaran 2.3.7 | Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang |
| Sasaran 6.9. | Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia ; 1)Terbangunnya modal sosial guna mewujudkan kepedulian sosial, gotong-royong, kepercayaan antarwarga, dan perlindungan lembaga adat, serta kehidupan bermasyarakat tanpa diskriminasi dan penguatan nilai kesetiakawanan sosial. | Sasaran 3.1.1 | Terwujudnya persamaan hak antar berbagai etnis di Kabupaten Halmahera Utara |
| Sasaran 6.2.2. | Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan | Sasaran 3.1.2 | Terwujudnya Kesetaraan Gender |
| Sasaran 6.9. | Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia ; 7)Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan umat beragama, antara lain ditandai dengan (a) meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan dialog antarumat beragama di kalangan tokoh agama, pemuda, dan lembaga sosial keagamaan; (b) meningkatnya pembinaan dan pengembangan Forum Kerukunan Umat | Sasaran 3.1.3 | Terwujudnya kerukunan antar dan inter umat beragama |

| | | | |
|----------------|--|----------------|--|
| | Beragama (FKUB). | | |
| Sasaran 6.7. | Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik ; | Sasaran 4.1.1 | Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan potensi pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, peternakan, pariwisata dan kehutanan . |
| Sasaran 6.7.1. | Peningkatan Kedaulatan Pangan | Sasaran 4.1.2. | Terwujudnya Swasembada dan Ketahanan pangan. |
| Sasaran 6.7.3 | Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; 2. Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup. | Sasaran 4.1.3 | Terwujudnya Lingkungan Hidup yang berkualitas dan berkelanjutan |
| Sasaran 6.6.8. | Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional | Sasaran 4.2.1 | Terwujudnya database perekonomian termasuk database usaha menengah dan kecil serta ketenagakerjaan |
| Sasaran 6.6.10 | Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja | Sasaran 4.2.2 | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan yang berbasis pengembangan keterampilan individu dan kelompok. |
| Sasaran 6.7. | Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor - Sektor Strategis Ekonomi Domestik | Sasaran 4.2.3 | Peningkatan kolaborasi antara pemerintah dan swasta (<i>Public Private Partnership</i>). |
| Sasaran 6.6.8. | Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional 5.Peningkatan Daya Saing Umkm Dan Koperasi. | Sasaran 4.2.4 | Terlaksananya aksesibilitas permodalan, pemasaran dan teknologi serta promosi produk UMKM. |
| Sasaran 6.6.8. | Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional 4)Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi. | Sasaran 4.2.5 | Terlaksananya fungsi kelembagaan Koperasi. |
| Sasaran 6.6.10 | Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja | Sasaran 4.3.1 | Terwujudnya Ketersediaan Lapangan kerja. |
| Sasaran 6.3.3. | Pengurangan Ketimpangan Antar Kelompok Ekonomi Masyarakat | Sasaran 4.3.2 | Terwujudnya Pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin, Lansia dan yang berkebutuhan khusus. |

Sumber : RPJMN 2015 – 2019 dan RJMD 2016 – 2021 Kab. Halmahera Utara 2016 diolah BAPPEDA 2016

4.4 Analisis Isu-isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah

4.4.1 Penentuan Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, RPJMD Provinsi dan RPJMN agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah. Adapun isu-isu strategis dapat ditampilkan sebagai berikut:

a. Isu Pendidikan dan Kesehatan dan Sumber daya Manusia

1. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran yang berkualitas
 2. Penguatan data base dan sistem informasi di lingkungan Dinas Pendidikan
-

3. Pembangunan masyarakat melalui revolusi mental dan lama harapan hidup yang lama
4. Rendahnya daya saing pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi
5. Rendahnya daya saing pendidikan formal untuk sektor ketrampilan
6. Rendahnya daya saing sistem pelayanan kesehatan

b. Isu Infrastruktur, Sarana Prasarana Pemerintahan, Politik dan Pelayanan Masyarakat

1. Rendahnya kondisi jalan/jembatan.
 2. Perlunya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan;
 3. Tersedianya rencana detail dan teknis tata ruang
 4. Belum optimal dan belum tertintegrasikan sistem perencanaan daerah dan tata ruang
 5. Tersedianya pedoman teknis perizinan tata ruang dan bangunan;
 6. Terawasinya pemanfaatan ruang kota
 7. Belum optimalnya penataan Kota/Kecamatan yang memadukan unsur kesehatan masyarakat, keindahan, dan tata ruang ekologis yang didukung oleh infrastruktur memadai untuk menjadi daya saing
 8. Perlunya peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan
 9. Minimnya prasarana air bersih dan sanitasi yang layak
 10. Perlunya Fasilitasi pelayanan publik berbasis *Information Communication and Technology (ICT)* melalui *electronic government* di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara dan Peningkatan kualitas SDM pengelola sistem administrasi
-

11. Perlunya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
12. Kurangnya peran serta masyarakat dalam partisipasi kebersihan dan keindahan lingkungan pemukiman
13. Pengembangan minat baca dan pembinaan perpustakaan
14. Perlunya Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam rangka meningkatkan tenaga terampil melalui sekolah kejuruan, pelatihan dan atau kursus-kursus
15. Layanan aparat keamanan dan penegakan dan perlindungan hukum di daerah belum optimal

c. Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

1. Pengolahan sampah secara mandiri dan benar
2. Pelaksanaan *recycle, reuse* dan *reduce*
3. Masih kurangnya pengendalian terhadap pencemaran kerusakan lingkungan

d. Isu Reformasi dan Tata kelola Pemerintah

1. Rendahnya etos kerja dan budaya organisasi yang ada dilingkungan pemerintahan
2. Fungsi pengawasan dan hukuman yang belum ditegakkan
3. Masih kurangnya reward terhadap prestasi birokrat
4. Tidak seriusnya menangani pengelolaan keuangan
5. Perlunya peningkatan praktek KKN di lingkungan birokrasi
6. Perlunya pemahaman secara komprehensif terhadap tata kelola pemerintahan yang baik
7. Belum optimalnya Tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Governance*)

e. Isu Sosial Budaya dan Keagamaan

1. Belum tersedianya Perda tentang Adat di Halmahera Utara
 2. Masih lemahnya peran organisasi keagamaan.
-

3. Tingginya Kesenjangan Sosial

f. Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi serta Pengembangan Investasi dan Iklim Usaha

1. Pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat
2. Perlunya menciptakan iklim investasi yang pro rakyat
3. Peningkatan sumberdaya alam yang kreatif dan inovatif namun ramah lingkungan
4. Peningkatan jaringan komunikasi untuk internet di setiap kecamatan
5. Ketepatan waktu dan keramahan dari pengelolaan ijin untuk investasi.
6. Perlunya akselerasi komoditi unggulan sebagai upaya peningkatan pendapatan dari masyarakat.
7. Rendahnya daya saing sektor Kepariwisata
8. Belum optimalnya produksi dan distribusi perindustrian, perdagangan dan koperasi
9. Daya saing Pertanian Belum Optimal

4.4.2 Pembobotan

Tabel 4.4
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

| No. | Kriteria | Bobot |
|------------|--|--------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional | 10 |
| 2 | Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah | 10 |
| 3 | Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat | 20 |
| 4 | Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah | 10 |
| | Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani | 15 |
| | Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan | 10 |
| | Total | 100 |

Tabel 4.5
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

| No. | Isu-Isu Strategis | Total Skor | Rata-Rata skor |
|-------------------|---|-------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan Pemerintahan yang bersih | 93 | 23,25 |
| 2 | Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar | 97 | 24.25 |
| 3 | Mewujudkan persamaan hak dan kedudukan bagi seluruh warga masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan | 90 | 22.5 |
| 4 | Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi kekayaan alam yang berwawasan lingkungan dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan serta mengurangi angka kemiskinan | 95 | 23.75 |
| TOTAL SKOR | | | 93,75 |
